



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PASURUAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km.9, Gedung Lettu. Imam Adi Lt. 1

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2024 sesuai dengan Dokumen Perubahan Anggaran TA. 2024 Nomor : DPPA / A.3 / 2.08.2.14.0.00.01.0000 / 001 / 2024. Hal ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* pada Perangkat Daerah. Realisasi program kegiatan dari Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) akan mendukung capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Capaian kinerja ini menjadi landasan evaluasi dan pengawasan, sekaligus sebagai wujud pertanggung-jawaban OPD kepada para pemangku kepentingan.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan (LKjIP) DP3AP2KB tahun 2024 ini.



Pasuruan, 31 Januari 2025

Kepala Dinas P3AP2KB
Kabupaten Pasuruan

M. AGUS MASJHADY, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197008291991011001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum	3
1.4. Isu Strategis	6
1.5. Dasar Hukum	8
1.6. Sistematika Penyusunan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis	12
2.2. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	19
3.1.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	19
3.1.2. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja tahun sebelumnya	22
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)	25

	Halaman
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	27
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	30
3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
3.1.7. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan	39
3.2. Realisasi Anggaran	41
3.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024	41
3.2.2. Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2024	46
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	53
1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	54
2. Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (oleh Inspektorat Daerah) tahun sebelumnya	56
3. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP Tahun 2023	58
4. Penghargaan Tahun 2024.	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel : I-1 Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan	3
I-2 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian	3
I-3 Permasalahan dan Isu Strategis	6
II-1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	12
II-2 Strategi dan Arah Kebijakan	13
II-3 Target Kinerja Tahun 2024	15
II-4 Program dan Anggaran Tahun 2024	16
III-1 Skala Ordinal Pengukuran Kinerja	18
III-2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	19
III-3 Realisasi Kinerja Tahun 2022 s.d. 2024	22
III-4 Target Renstra Tahun 2024-2026 dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	25
III-5 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Standar Nasional	27
III-6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Indikator Tujuan / Sasaran	34
III-7 Skala Ordinal Pengukuran Efisiensi Sumber Daya	36
III-8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Indikator Program	37
III-9 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	39
III-10 Realisasi Anggaran Tahun 2024	41
III-11 Alokasi per-Sasaran Pembangunan	46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran : 1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	54
2. Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (oleh Inspektorat Daerah) tahun sebelumnya	56
3. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP tahun sebelumnya	65
4. Penghargaan Tahun 2024	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan yang akan dicapai pada sistem dan tata kelola administrasi instansi pemerintah diarahkan pada terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap satuan kerja dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta merealisasikan tujuan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan sah. Sejalan dengan itu maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengedepankan azas berdayaguna, berhasil guna, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta dengan menerapkan azas kepastian hukum azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas transparansi dan azas akuntabilitas.

Azas kepastian hukum adalah adanya jaminan bahwa setiap penyelenggara negara akan dikenai sanksi (administratif dan atau hukum) apabila terbukti melanggar peraturan perundangan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Azas proporsionalitas mengacu pada pengertian rentang tanggung jawab pelaksanaan tugas setiap penyelenggara negara berbanding lurus dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Azas profesionalitas berarti perwujudan pelaksanaan tugas setiap penyelenggara negara berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai latar belakang pendidikannya.

Azas transparansi adalah azas yang mengedepankan keterbukaan dan kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan sebagai bentuk partisipasi dalam memberikan masukan dan kontrol atas kinerja satuan kerja.

Azas akuntabilitas adalah azas yang mensyaratkan bahwa setiap penyelenggaraan program kegiatan harus dapat dihitung dan diukur secara kualitatif maupun kuantitatif serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah azas-azas tersebut telah dilaksanakan serta sejauh mana tingkat capaian kinerja satuan kerja dalam melaksanakan program kegiatannya adalah dengan memantapkan sistem pelaporan yang baku, menyeluruh, terukur dan memiliki bobot analisis yang tinggi. Sistem dimaksud dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban satuan kerja dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun serta melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan di tahun 2024 ini sesuai dengan tata kerja, tugas pokok fungsinya yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 179 Tahun 2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan sampai dengan hasil yang dicapai dan harapannya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (*Performance Improvement*) selanjutnya.

1.3. Gambaran Umum

Sampai dengan akhir tahun 2024, Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan memiliki personil sebanyak 116 orang yang terdiri dari PNS Kabupaten sebanyak 16 orang, PTT (kontrak) sebanyak 2 orang dan THL sejumlah 50 orang, sedangkan yang berstatus sebagai P3K Pusat terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebanyak 43 orang. Adapun rincian personil berdasarkan klasifikasinya adalah sebagai berikut :

Tabel I-1 : Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan

Golongan	IV	III	II	I	JML
Sebanyak (Orang)	26	34	4	-	64

Tabel I-2 : Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

Tingkat Pendidikan	Status / Banyaknya Pegawai						JML
	P N S		P3K		PTT	THL	
	Tk.II	Pusat	Tk.II	Pusat			
Doktor (S3)	-	-	-	-	-	-	-
Pasca Sarjana (S2)	9	2	-	-	-	-	11
Sarjana (S1)	5	26	-	1	-	29	61
D3 / D1	-	1	-	1	-	4	6
SLTA	2	2	-	3	2	16	25
SLTP	-	12	-	-	-	-	12
SD	-	-	-	-	-	1	1
TOTAL	16	43	-	5	2	50	116

Sumber Data : Sub Bag. Umpeg DP3AP2KB

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 196 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

Kedudukan dan Susunan Organisasi :

Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Utusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. terdiri atas :

- a. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - Sekretariat, terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan Pelaksana;
- c. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

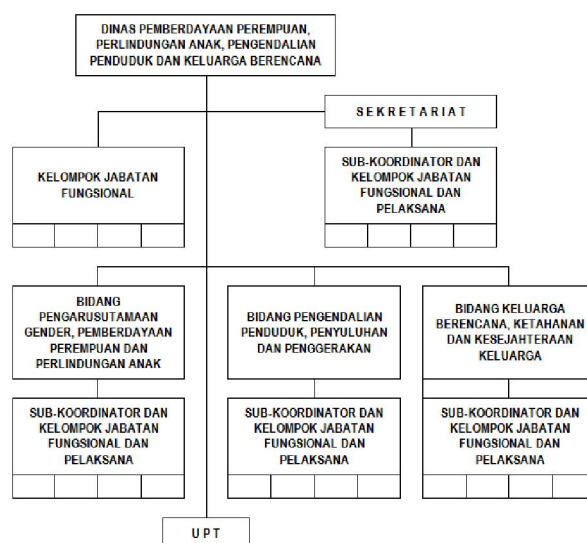
Tugas dan Fungsi :

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Pelaksanaan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan



dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 196 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan

sebagaimana Kedudukan dan Susunan Organisasi, dimana DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Kepala Dinas yang penyelenggaraannya dituangkan sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi.

1.4. Isu Strategis

Tabel I-3 : Permasalahan dan Isu Strategis

PERMASALAHAN	ISU AKTUAL	ISU STRATEGIS
1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak. Pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum berjalan dengan optimal karena data yang didapat terkadang kurang, sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan perempuan dan anak sudah dilaksanakan dengan gencar namun masih kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan budaya.	1. Adanya UU baru di tahun 2022 yakni UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga terbitnya SE Kemendagri Nomor 463 / 5318 / SJ tentang pembentukan UPTD PPA kabupaten / kota wajib membentuk UPTD PPA. Tahun 2022 sudah mulai membentuk UPTD PPA di Kabupaten Pasuruan.	1. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Terkendalanya pelaporan dari TPK (Tim Pendamping Keluarga) ke TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) terkait keluarga resiko stunting.	2. Keterlambatan Petunjuk Operasional (Jukops) dari pusat dalam penggunaan anggaran dan pertanggung jawaban.	2. Masih tingginya angka prevalensi stunting.
3. Masih rendahnya peran aktif dari masyarakat di dalam kampung KB dan kampung KB yang terbentuk masih kurang komitmen untuk updating kampung KB khususnya RDK (Rumah DataKu).	4. Belum terintegrasinya data pengendalian penduduk dalam new SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	3. Masih rendahnya capaian Kampung Keluarga Berkualitas.

PERMASALAHAN	ISU AKTUAL	ISU STRATEGIS
4. Masih Minimnya Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan yang Menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung Kb) (Dari 321 Desa dan 24 Kelurahan, Masih Terbentuk 39 Kampung Kb, 22 Tk.Dasar, 12 Berkembang, 3 Mandiri, 2 Berkelanjutan).	5. Mengingat Inpres. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Berkualitas, dimana target tahun 2024 semua Desa / Kelurahan di Indonesia.	
5. Unmet Need masih tinggi disebabkan oleh beberapa faktor seperti karakteristik demografi, sosial budaya, sikap dan kualitas pelayanan, tetapi di Kabupaten Pasuruan salah satu utama kebanyakan orang yang tidak ingin ber-KB karena masalah kesehatan, takut efek samping dan sosial budaya.		4. Masih tingginya <i>Unmet Need</i>
6. Masih rendahnya capaian MKJP yakni IUD, MOW dan MOP, dikarenakan takut dengan efek samping serta tidak mau menunda memiliki anak lebih lama.		5. Masih rendahnya capaian MKJP

Sumber : Renstra DP3AP2KB Tahun 2024-2026

1.5. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026;
6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 179 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.6. Sistematika Penyusunan

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjabaran antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, isu strategis, dasar hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan rencana strategis perangkat daerah, dan perjanjian kinerja perangkat daerah tahun yang berkenaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1.1. Membandingkan antara target & realisasi kinerja tahun N.

Dijelaskan secara singkat atas realisasi kinerja setiap pernyataan sasaran strategis dan indikaot kinerjanya. Capaian kinerja (%) diperoleh dari realisasi kinerja tahun N dibagi target tahun N dikali 100%.

1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun N dengan tahun N-2.

Dijelaskan secara singkat perbandingan realisasi kinerja tahun N dengan realisasi kinerja 2 tahun sebelumnya.

- 1.3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.

Dijelaskan secara singkat perbandingan realisasi kinerja tahun N dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

- 1.4. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika sama indikatornya).

Dijelaskan secara singkat perbandingan realisasi kinerja tahun N dengan realisasi kinerja standar Kabupaten / Provinsi / Nasional tahun N (jika sama indikatornya).

- 1.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dijelaskan secara singkat analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan capaian kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan untuk setiap indikatornya.

- 1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dijelaskan secara singkat analisis penggunaan sumber daya berdasarkan indikator tujuan / sasaran / program

- 1.7. Analisis Program yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dijelaskan secara singkat analisis program-program yang menunjang keberhasilan / kegagalan setiap pernyataan sasaran strategis dan indikator kerjanya.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan alokasi anggaran per sasaran pembangunan.

BAB IV PENUTUP

Pada sub bab ini disajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja tahun N.
2. Pernyataan Telah Direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
3. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Merujuk pada Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yaitu **Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat**, serta Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yaitu **Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia** dengan indikator **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**, maka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan ditentukan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II-1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

SASARAN RPD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA PD
1. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Indikator : Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1. Meningkatnya Pembangunan Keluarga Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga (IPK / iBangga)	1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			2. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak
		2. Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)
			4. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sumber Data : Renstra Dinas P3AP2KB Tahun 2024-2026

Tabel II-2 : Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia		
Tujuan PD : Meningkatnya Pembangunan Keluarga		
SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga / organisasi sosial masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak; 3. Meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada Bupati dan lintas OPD dalam penganggaran yang responsif gender; 4. Mengoptimalkan tim pendamping kekerasan tingkat desa / kelurahan, kecamatan, Forum Anak dan UPT PPA untuk pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta rehabilitasi korban; 5. Meningkatkan peran serta masyarakat, OPD terkait, dan segenap stake holder dalam mewujudkan Pasuruan Layak Anak dan Pasuruan yang responsive gender.	1. Optimalisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2. Peningkatan komitmen dan koordinasi dalam penganggaran yang responsive gender; 3. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan gender; 4. Optimalisasi tim pendamping kekerasan tingkat desa / kelurahan dan forum anak; 5. Dukungan sarana prasarana bagi komunitas forum anak; 6. Penguatan korban kekerasan secara fisik, psikologis dan ekonomi; 7. Peningkatan komitmen dan koordinasi antar PD terkait maupun aparat penegak hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak.
2. Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	1. Pencegahan stunting dengan melakukan KIE mengenai kesehatan reproduksi dan gizi serta pola asuh anak kepada masyarakat; 2. Meningkatkan dan melakukan revitalisasi Program KB khususnya MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang); 3. Pembinaan peserta KB dan peningkatan advokasi KIE; 4. Masyarakat dan meningkatkan peran serta mitra kerja dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk ber KB;	1. Percepatan penurunan keluarga resiko stunting; 2. Peningkatan cakupan akseptor MKJP; 3. Pemerataan kelengkapan dukungan pelayanan dan penyuluhan KB; 4. Pelayanan akseptor KB yang berkualitas; 5. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi akseptor KB melalui program Bangga Kencana;

SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	5. Meningkatkan pembinaan / pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka <i>Drop Out</i> (DO), serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); 6. Mengoptimalkan distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB / Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber KB terpenuhi secara baik; 7. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan / PKK untuk dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 8. Meningkatkan pemahaman mengenai 8 fungsi keluarga dalam ketahanan keluarga; 9. Meningkatkan pembinaan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA), PIK-R, GenRe dan PPKS dalam ketahanan dan pembangunan keluarga; 10. Meningkatkan pembinaan remaja melalui PIK-R / Generasi Berencana (Genre) 11. Meningkatkan peran pergerakan kader IMP dalam KIE wawasan kependudukan; 12. Meningkatkan peran serta dan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan; 13. Mengoptimalkan dan mengembangkan kampung KB; 14. Mengoptimalkan keberadaan Kampung KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga; 15. Mengoptimalkan updating data kependudukan dan keluarga beresiko stunting melalui aplikasi SIGA dan Pendataan Keluarga.	6. Peningkatan pembangunan dan ketahanan keluarga dan pembentukan karakter keluarga yang berkualitas; 7. Dukungan sarana prasarana bagi kelompok kegiatan (poktan) tribina (BKB, BKR,BKL) dan PIK-R, GenRe dan PPKS; 8. Optimalisasi Poktan Tribina (BKB,BKR,BKL),UPPKA, PIK-R dan GenRe 9. Peningkatan kader IMP dalam penyuluhan berwawasan kependudukan; 10. Peningkatan dukungan antar lintas sektor dan masyarakat dalam pembangunan berwawasan kependudukan; 11. Optimalisasi Kampung KB; 12. Optimalisasi updating data kependudukan

SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan manajemen kinerja aparatur pemerintah daerah; 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah.	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sumber Data : Renstra DP3AP2KB Tahun 2024-2026

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun ringkasan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel II-3 : Target Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK / iBangga)	-	61,50
1.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	67,50
		b. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	100
2.	Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen	10,50
		d. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)	Persen	2,19
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	83,50

Sumber Data : PK Perubahan DP3AP2KB Tahun 2024

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis sesuai yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Program Penunjang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 24.001.379.426,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II-4 : Program dan Anggaran Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Ket.
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.510.361.526,00	P-APBD
2	Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	654.999.000,00	P-APBD
3	Perlindungan Perempuan	153.900.000,00	P-APBD
4	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	189.999.900,00	P-APBD
5	Perlindungan Khusus Anak	362.100.000,00	P-APBD
6	Pengendalian Penduduk (Dalduk)	598.800.000,00	P-APBD
7	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.383.371.000,00	P-APBD
8	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.147.848.000,00	P-APBD
TOTAL		24.001.379.426,00	

Sumber Data : PK Perubahan DP3AP2KB Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, elastis, nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Nepotisme, Kolusi dan Korupsi.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta urusan pemberdayaan dan perlindungan anak, perlu ditetapkan sasaran dan indikator dengan prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Time-based* (SMART) untuk menetapkan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

- Indikator positif apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaian kinerjanya, dengan rumus :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Indikator negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang digunakan dalam laporan kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel III-1 : Skala Ordinal Pengukuran Kinerja

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
91 % $\leq$ 100 %	Sangat Berhasil
76 % $\leq$ 90 %	Berhasil
66 % $\leq$ 75 %	Cukup Berhasil
51 % $\leq$ 65 %	Kurang Berhasil
$\leq$ 50 %	Tidak berhasil

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil dari pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian tujuan, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Tujuan dan sasaran strategis yang dilaporkan dalam Bab III ini terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran, sesuai yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

Pengukuran terhadap kinerja organisasi dilakukan selain dari capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran tingkat efisiensi sumber daya. Tingkat efisiensi sumber daya diukur dengan selisih antara persentase capaian kinerja dengan persentase capaian realisasi anggaran.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan, maka capaian kinerja secara keseluruhan dilaporkan sebagai berikut :

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel III-2 : Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK / iBangga)	-	61,50	62,13	101,02
Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	67,50		
	b. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	100,00	100,00	100,00
2. Meningkatkan Keluarga yang Berkualitas	c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen	10,50	3,50	166,67
	d. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)	Persen	2,19	4,66	212,50
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD	e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	83,50	82,00	98,20

Sumber Data : DP3AP2KB

Dari tabel III-2 di atas, menunjukan bahwa indikator kinerja Tujuan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK/iBangga) di tahun 2024 disimpulkan **Sangat Berhasil** dengan capaian sebesar 101,02 %, dimana dari target yang ditetapkan sebesar 61,50 terealisasi sebesar 62,13.

Sedangkan untuk capaian masing-masing indikator kinerja Sasaran dapat dijelaskan secara singkat antara lain sebagai berikut :

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Di tahun 2024 ditargetkan nilai sebesar 67,50 akan tetapi sampai dengan dokumen LKjIP ini disampaikan masih belum ada data resmi yang dikeluarkan pihak terkait dalam hal ini oleh BPS, maka kami akan menyampaikan data tersebut pada dokumen Reviu LKjIP.

b. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

Terkait dengan indikator kinerja tersebut disampaikan selama periode tahun 2024 ini dari sebanyak 114 kasus yang telah dilaporkan pada Tim PPT PPA diantaranya 42 kasus telah terselesaikan dan 72 kasus lainnya dalam tahap proses pelayanan pendampingan dan masih akan terus dilanjutkan sampai dengan tahapan dan proses tersebut selesai. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja 100 % dari target 100 % yang dapat disimpulkan dalam kategori **Sangat Berhasil**.

c. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Adalah persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat / cara kontrasepsi. Tingginya angka *Unmet Need* KB mengindikasikan rendahnya akses ke layanan kontrasepsi dengan berbagai sebab. Oleh karena itu, semakin rendah angka *Unmet Need* artinya semakin bagus capaian kinerja (indikator negatif). Realisasi capaian angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) Tahun 2024 menunjukkan angka capaian sebesar 166,67 % atau dikatakan **Sangat Berhasil** dimana dari target 10,50 % yang ditetapkan terealisasi 3,50 %.

d. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)

Di tahun 2024 sebanyak 365 atau 100 % dari seluruh desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Pasuruan telah di terdaftar sebagai Kampung Keluarga Berkualitas, dan untuk selanjutnya maka perlu adanya tahapan peningkatan pada klasifikasi dari “Dasar” ke “Mandiri” dan berikutnya adalah “Berkelanjutan”. Pada level Kampung Berkualitas “Mandiri” di tahun Th. 2023 sebanyak 11 desa / kelurahan dari level “Mandiri” naik statusnya ke level “Berkelanjutan” dan di tambah lagi di tahun 2024 sebanyak 6 desa / kelurahan naik dari level “Dasar” menjadi “Mandiri”,.maka sejumlah 17 desa / kelurahan telah berstatus Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri dan Berkelanjutan yang menunjukkan capaian sebesar 212,50 % atau dikatakan **Sangat Berhasil** dimana dari target 2,19 % terealisasi 4,66 %.

e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

“Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 82,00 dengan kategori A (Memuaskan)” sebagaimana dikutip dari LHE AKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, maka apabila dibandingkan dengan target di tahun 2024 sebesar 83,50 akan didapati angka capaian 98,20 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

3.1.2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Tabel III-3 : Realisasi Kinerja Tahun 2022 s.d. 2024

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun		
			2022	2023	2024
Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK / iBangga)	-	58,55	62,65	62,13
Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	67,12	65,28	
	b. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	100,00	100,00	100,00
2. Meningkatkan Keluarga yang Berkualitas	c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen	7,30	3,81	3,50
	d. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)	Persen	1,64	1,92	4,66
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	82,08	81,65	82,00

Sumber Data : DP3AP2KB

Penjelasan singkat dari tabel III-3 di atas adalah sebagai berikut :

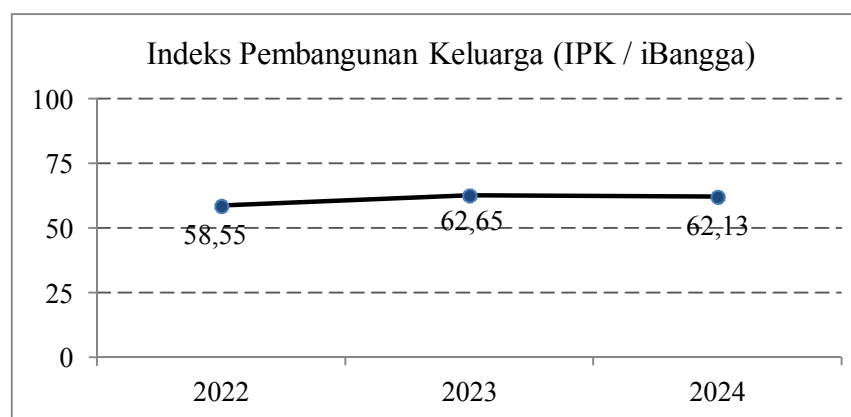
Realisasi indikator tujuan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK/iBangga) apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya turun sebesar 0,52 poin dari realisasi sebesar 62,65 di tahun 2023 menjadi sebesar 62,13 tahun 2024.

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 capaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK / iBangga) sudah mencapai 106,12 % dari realisasi sebesar 58,55 tahun 2022 menjadi sebesar 62,13 tahun 2024.

Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK/iBangga) Kabupaten Pasuruan tahun 2022-2024 menunjukkan *trend* yang meningkat yaitu : tahun 2022 sebesar 58,55 meningkat menjadi 62,65 pada tahun 2023 selanjutnya turun menjadi 62,13 tahun 2024.

Trend peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik : III-1 Perkembangan IPK Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024



Sumber Data : Sistem Pendataan Keluarga (SIGA)

Penjelasan singkat indikator sasaran berdasarkan tabel III-3 adalah sebagai berikut :

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Meskipun tahun 2024 belum bisa di tampilkan, tapi kita dapat lihat realisasi Indeks pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pasuruan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 67,12 dan tahun 2023 terealisasi sebesar 65,28, maka IDG mengalami penurunan angka 1,84 poin. Sedangkan IDG nasional sebesar 76,90 dan Provinsi Jawa Timur sebesar 74,90 di tahun 2023. Kecenderungan penurunan tersebut di pengaruhi beberapa faktor di antaranya Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, Kelembagaan dan pelembagaan PUG serta Integrasi gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.

b. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran persentase penanganan kekerasan perempuan dan anak, cenderung stabil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 100 % pada tahun 2024. Hal ini karena penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak lebih di fokuskan pada kualitas pelayanan / pendampingan terhadap korban baik secara hukum maupun pemulihan kesehatan fisik dan psikologis / mental (*Trauma Healing*) dengan dukungan sumber daya yang memadai, maka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban ditangani dan terlayani dengan baik sehingga dapat kembali hidup normal di masyarakat.

c. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Pada tahun 2024 terealisasi 3,50 % atau turun 0,31 % bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,81 %. Hal ini menunjukkan progress yang sangat baik karena indikator sasaran ini adalah indikator negatif semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya.

d. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)

Realisasi sebesar 4,66 % tahun 2024 merupakan pencapaian tertinggi selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan selisih 2,74 % bila dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 1,92 %. Mengingat indikator kinerja sasaran ini adalah indikator yang baru dalam Renstra Dinas P3AP2KB Kab. Pasuruan Tahun 2024-2026.

e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator sasaran ini terealisasi 82,00 tahun 2024 atau naik 0,35 poin dibandingkan tahun 2023 sebesar 81,65 dan meskipun belum mencapai target sebesar 83,50 namun demikian masih tetap menempatkan posisi Dinas P3AP2KB Kab. Pasuruan tahun 2024 dalam kategori A (Memuaskan).

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah (Renstra)

Tabel III-4 : Target Renstra Th. 2024-2026 dan Realisasi Kinerja Th. 2024

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun			Realisasi Th. 2024
		2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK / iBangga)	61,50	62,50	63,50	62,13
Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,50	66,75	67,00	
	b. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Meningkatkan Keluarga yang Berkualitas	c. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	11,10	11,00	10,90	3,50
	d. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)	2,19	2,47	2,74	4,66
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD	e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,50	83,55	86,00	82,00

Sumber Data : DP3AP2KB

Pada Tabel III-4 di atas indikator tujuan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK/iBangga) bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 63,50 tahun 2026 tingkat kemajuannya sudah mencapai 97,85 % atau dari target sebesar 61,50 pada tahun 2024 sudah terealisasi sebesar 62,13.

Pencapaian Indeks pembangunan Keluarga (IPK / iBangga) pada awal periode Renstra tahun 2024 ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal tersebut tidak terlepas dari hasil kerja keras semua pihak mulai pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, disamping peran / dukungan dan peran serta seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan untuk realisasi kinerja sasaran tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada awal periode Renstra Dinas P3AP2KB tahun 2024-2026 menargetkan angka sebesar 66,50 melihat realisasi 2 (dua) tahun terakhir yaitu sebesar 67,12 tahun 2022 dan 65,28 di tahun 2023. diharapkan realisasi tahun 2024 dapat mencapai target yang ditetapkan.

b. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

Seperti pada Renstra periode sebelumnya Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak masih tetap ditargetkan 100 % mulai tahun 2024 sampai akhir periode Renstra tahun 2026 dengan realisasi dan capaian 100 % pada tahun 2024 ini.

c. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Terdapat selisih yang cukup jauh antara target Renstra tahun 2024 sebesar 11,10 % bila dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 3,50 %, hal ini mengingat provinsi Jawa Timur menargetkan sebesar 11,74 % dan kabupaten Pasuruan 11,70 % pada tahun 2023. Pencapaian yang luar biasa ini dapat diartikan juga sebagai keberhasilan dalam penyampaian pada masyarakat terutama pasangan usia subur dalam memahami arti pentingnya mengikuti program KB.

d. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024-2026, indikator persentase kampung KB (Mandiri) sudah mencapai 170,08 % dari target tahun 2026 sebesar 2,74 %. Perkembangan Kampung Keluarga Berkualitas menunjukkan peningkatan yang signifikan ini sebagai wujud dari pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa / kelurahan.

e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Realisasi sebesar 82,00 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 86,00 menghasilkan capaian 95,35 % atau naik 0,35 poin dari tahun 2023 sebesar 81,65 dan tergolong dalam kategori A (Memuaskan).

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Benchmarking realisasi kinerja adalah proses membandingkan kinerja organisasi dengan level standar yang ada di atasnya atau sektor yang sama guna memperbaiki kinerja dan mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya sebagaimana tabel berikut :

Tabel III-5 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Realisasi Th. 2024
		Provinsi	Nasional	
Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK / iBangga)	58,20	62,70	62,13
Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
	b. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	-	-	100,00
2. Meningkatkan Keluarga yang Berkualitas	c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	7,50	7,40	3,50
	d. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)	-	-	4,66
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	AA	-	82,00

Sumber Data : DP3AP2KB

Penjelasan secara singkat perbandingan antara realisasi kinerja (*benchmarking*) nasional, provinsi dan daerah dari tabel III-5 di atas adalah sebagai berikut :

Realisasi Indikator kinerja tujuan Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Pasuruan tahun 2024 menghasilkan angka sebesar 62,13 atau 3,93 poin melampaui realisasi di tingkat provinsi Jawa Timur sebesar 58,20 poin dan mencapai 99,09 % bila dibandingkan dengan realisasi Nasional tahun 2024 sebesar 62,70 poin.

Sedangkan *benchmarking* realisasi indikator kinerja sasaran dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pasuruan pada tahun sebelumnya (tahun 2023) terealisasi sebesar 65,28 poin atau mencapai 84,89% dari realisasi tingkat Nasional sebesar 76,90 poin dan selisih terpaut 9,62 poin bila dibandingkan realisasi provinsi Jawa Timur tahun 2023 sebesar 74,90 poin.

b. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

Pelaksanaan penanganan kekerasan perempuan dan anak tahun 2024 di Kabupaten Pasuruan pada tabel III-5 di atas menunjukkan realisasi sebesar 100 % dengan rincian data 114 kasus yang di laporan sebanyak 42 kasus terselesaikan dan 72 lainnya masih dalam proses pendampingan / pelayanan.

Perbedaan terkait penanganan kekerasan perempuan dan anak adalah di tingkat nasional maupun provinsi perhitungan menggunakan rasio dengan rumus jumlah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dikalikan 100.000, lalu dibagi jumlah penduduk (perempuan dan anak). Sedangkan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan menggunakan rumus perhitungan jumlah kasus yang dilaporkan atau korban (perempuan dan anak) dibagi jumlah kasus atau korban yang mendapat pelayanan / pendampingan.

Hal ini lebih disebabkan karena fokus yang diutamakan adalah pelayanan / pendampingan pada korban kekerasan perempuan dan anak agar mendapatkan penanganan yang lebih intensif dalam pemulihan kondisi fisik dan psikis / mental.

c. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Pada tabel III-5 di atas, maka kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmmet need*) Kabupaten Pasuruan tahun 2024 terealisasi sebesar 3,50 % dan telah melampaui realisasi provinsi jawa timur di angka 7,50 % bahkan di tingkat nasional yang mencapai 7,40 %.

d. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)

Pada tahun 2024, terdapat 7.186 Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) atau 84,85 % dari jumlah 8.469 desa / kelurahan di Jawa Timur. Dan termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Pasuruan sebanyak 365 desa / kelurahan atau 100 % sudah terdata sebagai Kampung Keluarga Berkualitas, dengan rincian klasifikasi “Dasar” sebanyak 348 desa / kelurahan, “Mandiri” sebanyak 6 desa / kelurahan dan “Berkelanjutan” sebanyak 11 desa / kelurahan tahun 2024. Sedangkan tingkat nasional masih menampilkan data capaian tahun 2022, dengan jumlah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebesar 21.568 dari 84.276 desa / kelurahan di Indonesia.

e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Pada penilaian SAKIP tahun 2024 Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan memperoleh nilai 82,00 poin dengan predikat A (memuaskan) sedangkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di tahun yang sama mendapatkan predikat BB (sangat baik) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat AA (sangat memuaskan).

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tabel III-2 : Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK / iBangga)	-	61,50	62,13	101,02
Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	67,50	-	-
	b. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	100,00	100,00	100,00
2. Meningkatkan Keluarga yang Berkualitas	c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	10,50	3,50	166,67
	d. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)	Persen	2,19	4,66	212,50
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD	e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	83,50	82,00	98,20

Sumber Data : DP3AP2KB

Indikator kinerja tujuan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dari tabel III-2 diatas Kabupaten Pasuruan menghasilkan realisasi 62,13 poin dengan capaian 101,02 % atau 0,63 poin diatas target tahun 2024 sebesar 61,50 poin. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah :

- Komitmen pemangku kepentingan serta kolaborasi kementerian dan lembaga mulai tingkat pusat, provinsi sampai daerah dalam pembangunan keluarga;
- Pengembangan desain pembangunan keluarga yang holistik dan integratif secara berkesinambungan;

- Penyiapan kehidupan berkeluarga melalui bimwin konseling keluarga, pemberian edukasi informasi dan sosialisasi perkawinan (perwujudan lingkungan yang nyaman dan aman bagi keluarga, dan penguatan data keluarga.);
- Aspek gender dan perlindungan anak, aspek perilaku berisiko pada anggota keluarga, isu terkait lansia dan disabilitas dan memerhatikan cakupan sinergi data keluarga.

Dari tabel III-2 realisasi kinerja sasaran tahun 2024 juga menunjukkan angka capaian yang sangat luar biasa dengan penjelasan singkat sebagai berikut :

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Meskipun realisasi dan capaian 2024 belum bisa dirilis pada kesempatan kali ini, akan tetapi dapat kami sampaikan beberapa faktor yang dapat mendukung peningkatan IDG adalah :

- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen;
- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;
- Meningkatkan pendapatan perempuan.

Dan yang telah dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan untuk mendukung faktor peningkatan IDG adalah melalui pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta kegiatan / sub kegiatan pendukung lainnya.

b. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

Tahun 2024 tercatat sebanyak 114 laporan kasus kekerasan perempuan dan anak dari jumlah tersebut sebanyak 42 kasus telah selesai sedangkan 72 kasus masih dalam proses pendampingan yang sampai kasus selesai 100% tahun 2024. Hal ini pastinya akan sulit ditangani apabila faktor pendukung yang kurang memadai antara lain :

- Komitmen dan kerjasama yang solid antar lembaga dan instansi terkait pencegahan serta penanganan korban kekerasan;
- Dukungan SDM, sarana dan prasarana serta operasional yang memadai.

c. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Unmet need KB adalah persentase pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya ber-KB, tetapi belum melakukannya. *Unmet need* KB dapat menyebabkan ledakan penduduk dan peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan. Pada tahun 2024 telah menunjukkan capaian yang sangat luar biasa yaitu sebesar 166,67 % atau terealisasi 3,50 % dari target 10,50 %.

Dalam faktor penurunan angka *unmet need* KB, beberapa hal yang telah dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan adalah dengan : Menangani masalah kesehatan reproduksi, Menyediakan layanan keluarga berencana yang terspesialisasi, Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kontrasepsi melalui program pembinaan keluarga berencana beserta kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya.

d. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)

Kampung Keluarga Berkualitas (KB) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program yang terintegrasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik. Pada tahun 2024 sebanyak 365 desa/kelurahan di Kabupaten Pasuruan sudah terdaftar sebagai kampung keluarga berkualitas dengan rincian klasifikasi 348 ds/kel. (Dasar), 6 ds/kel. (Mandiri) dan 11 ds/kel. (Berkelanjutan).

Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan program KKBPK dan pembangunan lainnya di Kampung KB sangat ditentukan oleh adanya faktor pendukung ini, adapun faktor yang kami maksud adalah faktor-faktor yang terkait dengan keadaan serta potensi wilayah, sumber daya alam, ataupun manusia, sarana dan prasarana baik yang menyangkut fisik maupun non fisik yang dapat kami rincikan sebagai berikut :

Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan program KKBPK dan pembangunan lainnya di Kampung KB sangat ditentukan oleh adanya faktor pendukung ini, adapun faktor yang dimaksud adalah faktor-faktor yang terkait dengan keadaan serta potensi wilayah, sumber daya alam, ataupun manusia, sarana dan prasarana baik yang menyangkut fisik maupun non fisik yang dapat kami rincikan sebagai berikut :

- Dukungan pemerintah, baik dari desa, kecamatan dan Instansi terkait lainnya.
- Dukungan masyarakat, seperti dukungan untuk program keluarga berencana
- Dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama
- Adanya sarana dan prasarana, seperti jalan, sekolah, posbindu, dan posyandu
- Adanya kader, seperti kader program KKBPK dan kader kesehatan
- Adanya penyuluh, seperti PLKB/PKB dan penyuluh Bangsa Kencana
- Adanya data penduduk dan keluarga
- Adanya kelompok kegiatan, seperti BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK/R

e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang hasil akhirnya adalah masyarakat dapat merasakan manfaatnya setelah APBD dijalankan melalui pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan secara lebih efektif, efisien, fokus, tepat sasaran, dan jelas berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Maka dari itu Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan dengan orientasi tujuan / sasaran strategis “Meningkatnya Pembangunan Keluarga” akan dapat terwujud apabila faktor pendukung SAKIP yaitu sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

*Tabel III-6 : Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024*

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (9=5/8x100)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TUJUAN : Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK / iBangga)	61,50	62,13	101,02	24.001.379.426	21.716.326.896	90,48	111,65
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,50			808.899.000	780.921.750	96,54	
	Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	100,0	100,0	100,00	552.099.900	534.638.200	96,84	103,27
Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	10,50	3,50	166,67	16.531.219.000	14.824.572.057	89,68	185,85
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)	2,19	4,66	212,67	598.800.000	552.046.035	92,19	230,69
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,50	82,00	98,20	5.510.361.526	5.024.148.854	91,18	107,70
Rata-rata Tingkat Efisiensi								

Sumber Data : DP3AP2KB

Berdasarkan tabel III-6 di atas, Dinas P3AP2KB Kab. Pasuruan sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian realisasi anggaran rata-rata 90,48 % dengan penjelasan singkat sebagai berikut :

rumus penghitungan (kolom 9) efisiensi diperoleh dari capaian Kinerja (kolom 5) dibagi capaian anggaran (kolom 8) dikali 100%. Maka indikator kinerja tujuan mendapatkan capaian efisiensi sebesar 111,65 % dari capaian kinerja 101,02 % dibandingkan capaian realisasi anggaran Dinas P3AP2KB tahun 2024 sebesar 90,48 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Efisien**.

Sedangkan capaian efisiensi pada masing-masing indikator sasaran berdasarkan tabel III-6 dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Anggaran pendukung indikator sasaran indeks pemberdayaan gender menghasilkan capaian 96,54 % sedangkan capaian IDG masih belum dapat ditampilkan.

b. Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

Indikator sasaran persentase penanganan kekerasan perempuan dan anak tahun 2024 menghasilkan angka capaian sebesar 100 %, apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran program pendukungnya sebesar 96,84 % maka menghasilkan angka efisiensi sebesar 103,27 % dan termasuk dalam kategori **Efisien**.

c. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Realisasi *Unmet Need* pada tahun 2024 mendapatkan angka capaian 166,67 % apabila dibandingkan capaian realisasi anggaran program pendukungnya yang mencapai 89,68 % maka akan menghasilkan efisiensi sebesar 185,85 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Efisien**.

d. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)

Pada tahun 2024 persentase kampung keluarga berkualitas dengan klasifikasi mandiri merupakan indikator kinerja sasaran yang mendapatkan capaian tertinggi yaitu 212,67 % dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran dari program pendukungnya yang mencapai 92,19 %, maka menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 230,69 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Efisien**.

e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 dapat dikategorikan **Efisiensi** dengan tingkat efisiensi sebesar 107,70 %, dari capaian kinerja 98,20 % dibandingkan capaian realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota sebesar 91,18 %.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah cara untuk mengukur seberapa efisien organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat efisiensi sumber daya yang dipergunakan, maka di perlukan skala ordinal sebagai tolok ukur sebagaimana tabel berikut :

Tabel III-7 : Skala Ordinal Pengukuran Efisiensi Sumber Daya

INTERVAL NILAI	TINGKAT EFISIENSI
< 90 %	Tidak Efisiensi
90 % - 100 %	Cukup Efisiensi
100 % - 110 %	Efisiensi
> 110 %	Sangat Efisiensi

Sumber : Pedoman Penyusunan LKjIP

Secara garis besar analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Indikator tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan tahun 2024 bisa dikatakan berhasil dan **Sangat Efisien** karena rata-rata pencapaian kinerjanya di atas 110 %.

**Tabel III-8 : Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan Indikator Program Tahun 2024**

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (9=5/8x100)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Persentase dokumen / laporan administrasi perangkat daerah yang baik / sesuai regulasi	100,0	100,0	100,0	5.510.361.526	5.024.148.854	91,18	109,68
Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase anggaran responsif gender	23,10	23,10	100,0	654.999.000	629.414.000	96,09	104,07
Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,76	9,76	100,0	153.900.000	151.507.750	98,45	101,58
Program pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase terpenuhinya hak anak di kabupaten	100,0	100,0	100,0	189.999.900	178.161.700	93,77	106,65
Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100,0	100,0	100,0	362.100.000	356.476.500	98,45	101,58
Program pengendalian penduduk	Persentase kecamatan yang melaksanakan updating data SIGA	100,0	100,0	100,0	598.800.000	552.046.035	92,19	108,48
Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	73,50	73,50	100,0	7.383.371.000	6.261.192.057	84,80	117,93
Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan pembinaan keluarga aktif melaporkan	58,00	58,00	100,0	9.147.848.000	8.563.380.000	93,61	106,83
Rata-rata Tingkat Efisiensi								107,10

Sumber Data : DP3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis telah melaksanakan 8 (delapan) program sesuai perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 dengan penjelasan singkat analisis efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan indikator program sebagai berikut :

Dari tabel III-8 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata kinerja indikator masing-masing program telah mencapai 100 %, penyerapan anggaran tahun 2024 mencapai 90,48 % dari pagu Rp. 24.001.379.426,- terealisasi sebesar Rp. 21.716.326.896,- atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan baik. Dan rata-rata tingkat efisiensi pada tahun 2024 mendapat nilai sebesar 107,10 % atau masuk dalam kategori **Efisiensi**.

Secara tidak langsung memang dapat dikatakan bahwa tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan program di tahun 2024, sedangkan untuk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) capaian realisasi anggaran tercatat sebesar 84,80 % hal ini lebih disebabkan karena faktor teknis yang dapat mempengaruhi diantaranya sumber pendanaan yang sebagian besar dari APBN (DAK) terkait regulasi atau kebijakan serta juknis pelaksanaan yang memerlukan waktu untuk koordinasi dan sinkronisasi dari tingkat pusat, provinsi sampai daerah.

Namun demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan akan melakukan monitoring, evaluasi guna perbaikan kedepannya.

3.1.7. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

**Tabel III-9 : Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan
Maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2024**

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program Penunjang	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
TUJUAN : Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK / iBangga)	101,02				
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase anggaran responsif gender	100,00	Menunjang
			Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100,00	Menunjang
	Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	100,00	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase terpenuhinya hak anak di kabupaten	100,00	Menunjang
			Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100,00	Menunjang
Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	166,67	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	100,00	Menunjang
			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan pembinaan keluarga aktif melaporkan	100,00	Menunjang
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)	212,67	Program pengendalian penduduk	Persentase kecamatan yang melaksanakan updating data SIGA	100,00	Menunjang
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	98,20	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Persentase dokumen / laporan administrasi perangkat daerah yang baik / sesuai regulasi	100,00	Menunjang

Sumber Data : DP3AP2KB

Dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan kinerja tahun berikutnya guna mencapai 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Sasaran sebagaimana Renstra tahun 2024-2026 dan Renja tahun 2024 serta di targetkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan didukung 8 (delapan) Program yang di jabarkan menjadi 22 (dua puluh dua) Kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan dengan penjelasan singkat sebagai berikut :

Sasaran 1). Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak, di ampu oleh Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di dukung dengan program antara lain : Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan Program perlindungan perempuan. Sedangkan indikator kinerja Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak, di dukung dengan program : Program pemenuhan hak anak (PHA) dan Program perlindungan khusus anak.

Sasaran 2). Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas, dengan indikator kinerja Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) di ampu oleh Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di dukung dengan Program pembinaan keluarga berencana (KB) dan Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS). Dan untuk indikator kinerja Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri) di ampu oleh Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di dukung dengan Program pengendalian penduduk.

Sasaran 3). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di ampu oleh Sekretariat dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, di dukung dengan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Realisasi anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan sampai dengan bulan Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III-10 : Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.510.361.526,-	5.024.148.854,-	91,18
1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	52.000.000,-	50.138.500,-	96,42
1.1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	30.000.000,-	28.141.000,-	93,80
1.2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	22.000.000,-	21.997.500,-	99,99
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.607.717.976,-	4.210.747.176,-	91,38
2.1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.399.048.232,-	3.053.337.432,-	89,83
2.2.	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1.125.599.744,-	1.074.769.744,-	95,48
2.3.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	83.070.000,-	82.640.000,-	99,48
3.	Administrasi umum perangkat daerah	117.849.900,-	113.727.296,-	96,50
3.1.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.911.500,-	23.163.500,-	89,39
3.2.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.423.400,-	7.310.000,-	98,47
3.3.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	84.515.000,-	83.253.796,-	98,51
4.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	519.828.900,-	441.091.382,-	84,85
4.1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	509.828.900,-	431.091.382,-	84,56
4.2.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	100,00
5.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	212.964.750,-	208.444.500,-	97,88
5.1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	167.492.750,-	163.394.500,-	97,55
5.2.	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	39.500.000,-	39.450.000,-	99,87
5.3.	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5.972.000,-	5.600.000,-	93,77

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
B.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	654.999.000,-	629.414.000,-	96,09
1.	Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten / kota	94.999.000,-	91.919.000,-	96,76
1.1.	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	1.010.100,-	1.000.000,-	99,00
1.2.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten / kota	35.000.000,-	34.251.000,-	97,86
1.3.	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.000.000,-	18.745.000,-	93,73
1.4.	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	38.988.900,-	37.923.000,-	97,27
2.	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota	560.000.000,-	537.495.000,-	95,98
2.1.	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	560.000.000,-	537.495.000,-	95,98
C.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	153.900.000,-	151.507.750,-	98,45
1.	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten / kota	58.400.000,-	56.620.750,-	96,95
1.1.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten / kota	58.400.000,-	56.620.750,-	96,95
2.	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten / kota	95.500.000,-	94.887.000,-	99,36
2.1.	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	6.000.000,-	6.000.000,-	100,00
2.2.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	89.500.000,-	88.887.000,-	99,32
D.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	189.999.900,-	178.161.700,-	93,77
1.	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten / kota	24.999.900,-	22.988.500,-	91,95
1.1.	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten / kota	24.999.900,-	22.988.500,-	91,95
2.	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten / kota	165.000.000,-	155.173.200,-	94,04
2.1.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten / kota	165.000.000,-	155.173.200,-	94,04

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
E.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	362.100.000,-	356.476.500,-	98,45
1.	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten / kota	53.100.000,-	49.548.000,-	93,31
1.1.	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten / kota layak anak, kecamatan layak anak, desa / kelurahan layak anak, dan DRPPA	53.100.000,-	49.548.000,-	93,31
2.	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota	239.980.000,-	237.908.500,-	99,14
2.1.	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	190.480.000,-	188.419.500,-	98,92
2.2.	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	49.500.000,-	49.489.000,-	99,98
3.	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	69.020.000,-	69.020.000,-	100,0
3.1.	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten / kota	69.020.000,-	69.020.000,-	100,00
F.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	598.800.000,-	552.046.035,-	92,19
1.	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten / kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	50.000.000,-	49.027.850,-	98,06
1.1.	Penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten / kota	10.000.000,-	9.831.100,-	98,31
1.2.	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD / MI dan SLTP / MTS, jalur non formal dan informal	30.000.000,-	29.315.500,-	97,72
1.3.	Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	10.000.000,-	9.881.250,-	98,81
2.	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten / kota	548.800.000,-	503.018.185,-	91,66
2.1.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	60.000.000,-	59.913.200,-	99,86
2.2.	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	309.800.000,-	304.281.200,-	98,22
2.3.	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	144.000.000,-	104.255.085,-	72,40
2.4.	Pembentukan dan operasionalisasi rumah data kependudukan di kampung kb untuk memperkuat integrasi program bangsa kencana di sektor lain	25.000.000,-	24.708.700,-	98,83
2.5.	Perumusan parameter pengendalian penduduk dan KB	10.000.000,-	9.860.000,-	98,60

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
G.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.383.371.000,-	6.261.192.057,-	84,80
1.	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	2.226.600.000,-	1.876.941.063,-	84,30
1.1.	Pengendalian program KKBPK	92.000.000,-	64.244.000,-	69,83
1.2.	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana	1.211.600.000,-	963.435.063,-	79,52
1.3.	Pelaksanaan Mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok)	348.000.000,-	295.880.000,-	85,02
1.4.	Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	100.000.000,-	98.600.000,-	98,60
1.5.	Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program bangga kencana sesuai kearifan budaya lokal	275.000.000,-	272.056.000,-	98,93
1.6.	Advokasi program bangga kencana oleh pokja advokasi kepada stakeholders dan mitra kerja	200.000.000,-	182.726.000,-	91,36
2.	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB / PLKB)	1.491.300.000,-	1.491.300.000,-	100,00
2.1.	Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	1.491.300.000,-	1.491.300.000,-	100,00
3.	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten / kota	3.202.221.000,-	2.474.393.394,-	77,27
3.1.	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	53.100.000,-	20.670.000,-	38,93
3.2.	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	2.156.206.000,-	1.469.510.000,-	68,15
3.3.	Penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	5.000.000,-	-	0,00
3.4.	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	915.000.000,-	913.192.000,-	99,80
3.5.	Pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	5.000.000,-	5.000.000,-	100,00
3.6.	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	42.915.000,-	41.218.000,-	96,05
3.7.	Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	15.000.000,-	14.840.894,-	98,94
3.8.	Peningkatan kesertaan KB pria	10.000.000,-	9.962.500,-	99,63
4.	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pelaksanaan pelayanan & pembinaan kesertaan ber-KB	463.250.000,-	418.557.600,-	90,35

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
4.1.	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	3.750.000,-	3.735.600,-	99,62
4.2.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	459.500.000,-	414.822.000,-	90,28
H.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	9.147.848.000,-	8.563.380.000,-	93,61
1.	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	9.137.848.000,-	8.553.405.000,-	93,60
1.1.	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA))	95.000.000,-	85.040.000,-	89,52
1.2.	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA))	300.000.000,-	297.920.000,-	99,31
1.3.	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	25.000.000,-	24.925.000,-	99,70
1.4.	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA))	8.707.848.000,-	8.136.220.000,-	93,44
1.5.	Penyediaan dan pengembangan materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	10.000.000,-	9.300.000,-	93,00
2.	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	10.000.000,-	9.975.000,-	99,75
2.1.	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	10.000.000,-	9.975.000,-	99,75

Sumber Data : DP3AP2KB

Realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.399.048.232,00 telah terealisasi sebesar Rp. 3.053.337.432,00 atau sebesar 89,83 % sedangkan Belanja Langsung dengan pagu anggaran Rp. 20.602.331.194,00 telah terealisasi sebesar Rp. 18.662.989.464,00 atau sebesar 90,59 %. Total Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) adalah Rp. 24.001.379.426,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.716.326.896,00 atau sebesar 90,48 %.

3.2.2. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Membandingkan antara alokasi anggaran per sasaran strategis dengan total anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III-11 : Alokasi per-Sasaran Pembangunan Tahun 2024

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
SASARAN : 1. MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.360.998.900,-	1.315.559.950,-	96,66
INDIKATOR : 1.1. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	808.899.000,-	780.921.750,-	96,54
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	654.999.000,-	629.414.000,-	96,09
Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten / kota	94.999.000,-	91.919.000,-	96,76
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	1.010.100,-	1.000.000,-	99,00
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten / kota	35.000.000,-	34.251.000,-	97,86
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.000.000,-	18.745.000,-	93,73
Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	38.988.900,-	37.923.000,-	97,27
Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota	560.000.000,-	537.495.000,-	95,98
Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	560.000.000,-	537.495.000,-	95,98
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	153.900.000,-	151.507.750,-	98,45
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten / kota	58.400.000,-	56.620.750,-	96,95
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten / kota	58.400.000,-	56.620.750,-	96,95
Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten / kota	95.500.000,-	94.887.000,-	99,36
Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	6.000.000,-	6.000.000,-	100,00
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	89.500.000,-	88.887.000,-	99,32

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
INDIKATOR : 1.2. PERSENTASE PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK	552.099.900,-	534.638.200,-	96,84
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	189.999.900,-	178.161.700,-	93,77
Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten / kota	24.999.900,-	22.988.500,-	91,95
Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten / kota	24.999.900,-	22.988.500,-	91,95
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten / kota	165.000.000,-	155.173.200,-	94,04
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten / kota	165.000.000,-	155.173.200,-	94,04
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	362.100.000,-	356.476.500,-	98,45
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten / kota	53.100.000,-	49.548.000,-	93,31
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten / kota layak anak, kecamatan layak anak, desa / kelurahan layak anak, dan DRPPA	53.100.000,-	49.548.000,-	93,31
Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota	239.980.000,-	237.908.500,-	99,14
Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	190.480.000,-	188.419.500,-	98,92
Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	49.500.000,-	49.489.000,-	99,98
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	69.020.000,-	69.020.000,-	100,0
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten / kota	69.020.000,-	69.020.000,-	100,00
SASARAN : 2. MENINGKATNYA KELUARGA YANG BERKUALITAS	17.130.019.000	15.376.618.092	89,76
INDIKATOR : 2.1. PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMETNEED)	16.531.219.000	14.824.572.057	89,68
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.383.371.000,-	6.261.192.057,-	84,80
Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi & edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	2.226.600.000,-	1.876.941.063,-	84,30
Pengendalian program KKBPK	92.000.000,-	64.244.000,-	69,83
Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana	1.211.600.000,-	963.435.063,-	79,52

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Pelaksanaan Mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok)	348.000.000,-	295.880.000,-	85,02
Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	100.000.000,-	98.600.000,-	98,60
Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program bangga kencana sesuai kearifan budaya lokal	275.000.000,-	272.056.000,-	98,93
Advokasi program bangga kencana oleh pokja advokasi kepada stakeholders dan mitra kerja	200.000.000,-	182.726.000,-	91,36
Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB / PLKB)	1.491.300.000,-	1.491.300.000,-	100,00
Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	1.491.300.000,-	1.491.300.000,-	100,00
Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten / kota	3.202.221.000,-	2.474.393.394,-	77,27
Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	53.100.000,-	20.670.000,-	38,93
Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	2.156.206.000,-	1.469.510.000,-	68,15
Penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	5.000.000,-	-	0,00
Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	915.000.000,-	913.192.000,-	99,80
Pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	5.000.000,-	5.000.000,-	100,00
Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	42.915.000,-	41.218.000,-	96,05
Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	15.000.000,-	14.840.894,-	98,94
Peningkatan kesertaan KB pria	10.000.000,-	9.962.500,-	99,63
Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pelaksanaan pelayanan & pembinaan kesertaan ber-KB	463.250.000,-	418.557.600,-	90,35
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	3.750.000,-	3.735.600,-	99,62
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	459.500.000,-	414.822.000,-	90,28
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	9.147.848.000,-	8.563.380.000,-	93,61
Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	9.137.848.000,-	8.553.405.000,-	93,60

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA))	95.000.000,-	85.040.000,-	89,52
Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA))	300.000.000,-	297.920.000,-	99,31
Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	25.000.000,-	24.925.000,-	99,70
Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA))	8.707.848.000,-	8.136.220.000,-	93,44
Penyediaan dan pengembangan materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	10.000.000,-	9.300.000,-	93,00
Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	10.000.000,-	9.975.000,-	99,75
Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	10.000.000,-	9.975.000,-	99,75
INDIKATOR : 2.2. PERSENTASE KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (MANDIRI)	598.800.000,-	552.046.035,-	92,19
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	598.800.000,-	552.046.035,-	92,19
Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten / kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	50.000.000,-	49.027.850,-	98,06
Penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten / kota	10.000.000,-	9.831.100,-	98,31
Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD / MI dan SLTP / MTS, jalur non formal dan informal	30.000.000,-	29.315.500,-	97,72
Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	10.000.000,-	9.881.250,-	98,81
Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten / kota	548.800.000,-	503.018.185,-	91,66
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	60.000.000,-	59.913.200,-	99,86
Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	309.800.000,-	304.281.200,-	98,22
Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	144.000.000,-	104.255.085,-	72,40
Pembentukan dan operasionalisasi rumah data kependudukan di kampung kb untuk memperkuat integrasi program bangsa kencana di sektor lain	25.000.000,-	24.708.700,-	98,83

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Perumusan parameter pengendalian penduduk dan KB	10.000.000,-	9.860.000,-	98,60
SASARAN : 3. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.510.361.526,-	5.024.148.854,-	91,18
INDIKATOR : 3.1. NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	5.510.361.526,-	5.024.148.854,-	91,18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.510.361.526,-	5.024.148.854,-	91,18
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	52.000.000,-	50.138.500,-	96,42
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	30.000.000,-	28.141.000,-	93,80
Evaluasi kinerja perangkat daerah	22.000.000,-	21.997.500,-	99,99
Administrasi keuangan perangkat daerah	4.607.717.976,-	4.210.747.176,-	91,38
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.399.048.232,-	3.053.337.432,-	89,83
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1.125.599.744,-	1.074.769.744,-	95,48
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	83.070.000,-	82.640.000,-	99,48
Administrasi umum perangkat daerah	117.849.900,-	113.727.296,-	96,50
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.911.500,-	23.163.500,-	89,39
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.423.400,-	7.310.000,-	98,47
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	84.515.000,-	83.253.796,-	98,51
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	519.828.900,-	441.091.382,-	84,85
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	509.828.900,-	431.091.382,-	84,56
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	100,00
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	212.964.750,-	208.444.500,-	97,88
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	167.492.750,-	163.394.500,-	97,55
Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	39.500.000,-	39.450.000,-	99,87
Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5.972.000,-	5.600.000,-	93,77

Sumber Data : DP3AP2KB

Dari tabel III-11 di atas dapat di jelaskan secara singkat terkait alokasi per sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Secara keseluruhan total pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebesar Rp. 24.001.379.426,- dengan anggaran yang berhasil terserap sebesar Rp. 21.716.326.896,- atau 90,48 %.

Alokasi anggaran untuk mendukung kinerja sasaran pembangunan 1). Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak, sebesar Rp. 1.360.998.900,- atau 5,67 % dari total pagu anggaran tahun 2024 dan terealisasi sebesar Rp. 1.315.559.950,- atau 96,66 %, dengan rincian alokasi anggaran per indikator kinerja sasaran : 1.a). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan anggaran Rp. 808.899.000,- terealisasi Rp. 780.921.750,- atau 96,54 %. Dan indikator kinerja sasaran 1.b). Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak, dengan anggaran sebesar Rp. 552.099.900,- terealisasi Rp. 534.638.200,- atau 96,84 %.

Alokasi anggaran untuk mendukung kinerja sasaran pembangunan 2). Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas, sebesar Rp. 17.130.019.000,- atau 71,37 % dari total pagu anggaran tahun 2024 dan terealisasi sebesar Rp. 15.376.618.092,- atau 89,76 %, dengan rincian alokasi anggaran per indikator kinerja sasaran : 2.a). Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) dengan anggaran Rp. 16.531.219.000,- terealisasi Rp. 14.824.572.057,- atau 89,68 %. Dan indikator kinerja sasaran 2.b). Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri), dengan anggaran sebesar Rp. 598.800.000,- terealisasi Rp. 552.046.035,- atau 92,19 %.

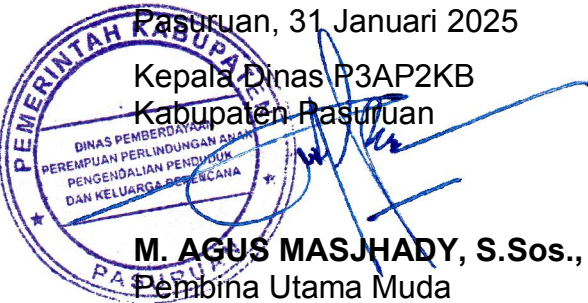
Dan anggaran untuk mendukung kinerja sasaran pembangunan 3). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja sasaran 3.a). Nilai SAKIP Perangkat Daerah, di alokasikan anggaran sebesar Rp. 5.510.361.526,- atau 22,96 % dari total pagu anggaran tahun 2024 dan terealisasi sebesar Rp. 5.024.148.854,- atau 91,18 %.

BAB IV P E N U T U P

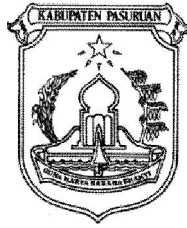
Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan / sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Secara umum berdasarkan hasil pencapaian keberhasilan kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan **Sangat Berhasil**, dengan rata-rata capaian indikator kinerja di atas **100 %**.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan kinerja ini, saran dan kritik yang membangun akan kami jadikan pertimbangan dalam menyusun laporan kinerja selanjutnya sehingga mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Pasuruan, 31 Januari 2025
Kepala Dinas P3AP2KB
Kabupaten Pasuruan

M. AGUS MASJHADY, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197008291991011001

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. AGUS MASJHADY, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.**

Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.K es.

Pasuruan, 24 September 2024

PIHAK PERTAMA

M. AGUS MASJHADY, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197008291991011001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	-	61,50
1.	SASARAN : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	67,50
		Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	100,00
2.	Meningkatnya Keluarga Yang Berkualitas	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen	10,50
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Mandiri)	Persen	2,19
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	83,50

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.510.361.526,00	P-APBD
2.	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	654.999.000,00	P-APBD
3.	Perlindungan Perempuan	153.900.000,00	P-APBD
4.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	189.999.900,00	P-APBD
5.	Perlindungan Khusus Anak	362.100.000,00	P-APBD
6.	Pengendalian Penduduk	598.800.000,00	P-APBD
7.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.383.371.000,00	P-APBD
8.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.147.848.000,00	P-APBD

PIHAK KEDUA

Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.K es.

Pasuruan, 24 September 2024

PIHAK PERTAMA

M. AGUS MASJHADY, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197008291991011001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 58 Telp. (0343) 424182 Fax. (0343) 424182
Website : www.inspektorat.pasuruankab.go.id Email : inspektorat_kab_pas@yahoo.com
PASURUAN – 67129



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

Nomor : x.700.1.2.7/ III.VII.06/424.060/2024
Tanggal : 26 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Website: www.inspektorat.pasuruankab.go.id Email : inspektorat.kabpas@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Nomor : x.700.1.2.7/ IV.VIII.06/424.060/2024
Tanggal : 26 Juli 2024
Lampiran : -
Satuan Kerja : **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan nomor: 700.1.2.7/813/424.060/2024 tanggal 24 Juni 2024.

b. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

e. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP**1. Metodologi Evaluasi AKIP**

Metodologi dalam evaluasi AKIP menggunakan kombinasi antara metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Adapun teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

- a. *Checklist* pengumpulan data dan informasi;
- b. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
- c. Observasi; dan
- d. Studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 81,40 dengan kategori A (Memuaskan), hal ini menunjukkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan, tingkat akuntabilitas kinerja sangat akuntabel dan berkinerja tinggi.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Menyelaraskan target kinerja pada setiap dokumen perencanaan.	Sudah dilakukan penyelarasan target kinerja pada setiap dokumen perencanaan

2.	Melakukan pengarahan yang intensif kepada setiap pegawai terkait kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi dan individu.	Sudah dilakukan pengarahan yang intensif kepada setiap pegawai terkait capaian kinerja organisasi dan individu
3.	Memanfaatkan hasil Pengukuran kinerja dalam penyesuaian Strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.	Sudah dilakukan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.
4.	Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.	Sudah dilakukan perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

II. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kelemahan dalam implementasi AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dan 2024 serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Sub koordinator.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	>60-70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50-60	Cukup, Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.



6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,00	24,60
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,60	24,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,05	12,30
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			81,65	82,00

(Dalam poin a s.d. d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan secara konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- Dokumen laporan kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, namun belum terdapat analisis tentang informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja).

- b. Terdapat mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja namun belum memanfaatkan Teknologi informasi (aplikasi).
- c. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, namun terdapat beberapa target dalam Renja 2024 yang belum selaras dengan SK IKU 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

b. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, agar dapat melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. LKjIP agar menyajikan analisis hasil perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja level di atasnya (benchmarking).
- b. Hendaknya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi E-SAKIP).
- c. Menyelaraskan rumusan target dalam dokumen Renja 2024, SK IKU 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

III. Penutup

a. Simpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 82,00 dengan kategori A (Memuaskan), yang memberikan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong dalam melaksanakan implementasi SAKIP dengan lebih baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, antara lain dengan;

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- Melaporkan kinerja pelayanan kepada publik secara transparan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

**PIH. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**



MARIATI, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19821121 200112 2 001

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS / PROGRES PENYELESAIAN
1.	LKjIP agar menyajikan analisis hasil perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja level di atasnya (<i>benchmarking</i>)	Sudah menyajikan analisis hasil perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja level di atasnya (<i>benchmarking</i>) pada dokumen LKjIP tahun 2024	Dokumen LKjIP tahun 2024	Tribulan 1 Th 2025	Subko Sungram dan Pelaporan	Selesai (100%)
2.	Hendaknya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi E-SAKIP)	Menyesuaikan dengan jadwal pengisian data monev serta arahan dari Tim SAKIP Daerah	Pengisian data pada aplikasi E-SAKIP	Tribulan 1 Th 2025	Subko Sungram dan Pelaporan	Selesai (100%)
3.	Menyelaraskan rumusan target dalam dokumen Renja 2024, SK IKU 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Sudah dilakukan penyeselarasan target kinerja pada setiap dokumen perencanaan	Dokumen Reviu Renstra, Renja, RKT, Rencana Aksi, PK	Tribulan 1 Th 2025	Subko Sungram dan Pelaporan	Selesai (100%)

Pasuruan, 31 Januari 2025
 Kepala Dinas P3AP2KB
 Kabupaten Pasuruan



MOHAMMAD AGUS MASJHADY, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197008291991011001

PENGHARGAAN TAHUN 2024

No.	Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Dokumentasi
1.	Kategori Terbaik 1 pada kegiatan Verifikasi dan Validasi Keluarga Beresiko Stunting Tahun 2024	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur	
2.	Kategori Terbaik 2 Pelayanan KB dalam rangka HUT IBI Tahun 2024	BKKBN Pusat	
3.	Kategori Terbaik 1 pada Gerakan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan KKBPK dalam SIGA "Gak Pake Lama" Tahun 2024	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur	

Pasuruan, 31 Januari 2025

Kepala Dinas P3AP2KB
Kabupaten Pasuruan
M. AGUS MASJHADY, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197008291991011001

Catatan :

